

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kolaka**

Kementrian Koperasi dan UKM adalah salah satu kementrian dalam pemerintahan indonesia yang membindangi koperasi dan usaha kecil menengah. Kementrian Koperasi dan UKM di pimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM).

Tugas dan Fungsi Kementrian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552,553 dan 554, yaitu: Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sejarah singkat terbentuknya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan menengah Kabupaten Kolaka berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 perkoperasian dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan adanya perubahan derugulasi pada tahun 2015 dari Perindustrian perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga terjadinya pemisahan menjadi dua Dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kolaka.

## **2. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka**

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 42 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka mempunyai tugas pokok melaksanakan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Adapun fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka pasal 10 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan program Dinas Koperasi dan UMKM dan mensusaikan dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
3. Menetapkan Penerbitan izin pembukuan kantor cabang
4. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan lintas daerah serta menetapkan pelaksanaan administrasi umum perencanaan program anggaran dan ketatausahaan.
5. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi di lintas daerah

6. Mengkordinasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi di wilayah lintas daerah
7. Mengkordinasi Pendidikan dan Latihan perkoperasian di wilayah lintas daerah
8. Mengkordinasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah serta pemberdayaan usaha kecil.
9. Mengkordinasi pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka

Menuju koperasi dan usaha kecil menengah yang maju, unggul dan mampu mensejahterakan ekonomi rakyat.

#### b. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka

Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Kerakteristik Responden

#### a. Kerakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

Berikut adalah kerakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 4 1 Kerakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	22	36,7%
2	Perempuan	38	63,3%
Total		60	100%

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden pada penelitian ini sejumlah 60 responden yang terdiri dari 36,7% berjenis kelamin laki-laki dan 63,3% berjenis kelamin perempuan.

#### **b. Kerakteristik Responden Berdasarkan Umur**

Berikut adalah kerakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir.

**Tabel 4 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	17-25	11	18,3%
2	25-30	8	13,3%
3	30-35	20	33,3%
4	35-50	15	25,0%
5	50 Ke atas	6	10,0%
Total		60	100%

Sumber data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 responden dalam penelitian ini berjumlah 60 responden terdiri dari 18,3% pada umur 17-25 tahun. 13,3% pada umur 25-30 tahun. 33,3% pada umur 30-35 tahun. 25,0% pada umur 35-50 tahun dan 10,0% pada umur 50 tahun ke atas.

#### **c. Kerakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

Berikut adalah kerakteristik responden berdasarkan jenis usaha

**Tabel 4 3 Kerakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Dagang	48	80,0%
2	Jasa	7	11,7%
3	Produksi	5	8,3%
4	Lainnya	0	0%
Total		60	100%

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini dengan jenis usaha dagang berjumlah 48 orang, responden dengan jenis usaha jasa 7 orang, dan responden dengan jenis usaha produksi 5 orang.

## 2. Deskripsi Variabel

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator-indikator variabel penelitian pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2), kepercayaan pada pemerintah (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y), dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

**Tabel 4 4 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel pengetahuan Pajak**

Item	STS		TS		N		S		SS		Total	Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X1.1					1	1.7	49	81.7	10	16.7	249	4.15
X1.2							47	76.7	14	21.7	253	4.22
X1.3							46	76.7	14	23.3	254	4.23
X1.4			1	1.7			43	71.1	16	26.7	254	4.23
X1.5					1	1.7	31	51.7	28	46.7	267	4.45
X1.6					3	5	34	56.7	23	38.3	260	4.33

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas jawaban responden dalam penelitian ini dengan indeks tertinggi terdapat pada item X1.5 dengan skor 267 dengan rata-rata 4.45. Sedangkan pernyataan dengan indeks terendah yaitu pada item X1.1 dengan skor 249 dengan rata-rata 4.15.

**b. Deskripsi Variabel Tarif Pajak (X2)**

**Tabel 4 5 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Tarif Pajak**

Item	STS		TS		N		S		SS		Total	Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X2.1					7	11.7	38	63.3	15	25	248	4.13
X2.2	1	1.7	4	6.7	17	28.3	29	28.3	9	15	221	3.68
X2.3			4	6.7	14	23.3	32	53.3	10	16.7	228	3.80
X2.4					7	11.7	44	73.3	9	15	242	4.03

Sumber Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas jawaban responden dalam penelitian ini dengan indeks tertinggi terdapat pada item X2.1 dengan skor 248 dengan rata-rata 4.13. Sedangkan indeks dengan nilai terendah terdapat pada pernyataan X2.2 dengan skor 221 dengan rata-rata 3.68.

**c. Deskripsi Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)**

**Tabel 4 6 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah**

Item	STS		TS		N		S		SS		Total	Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X3.1			1	1.7	9	15	45	75.0	5	8.3	234	3.90
X3.2					2	3.3	17	28.3	41	68.3	279	4.65
X3.3			1	1.7	4	6.7	42	70.0	13	21.7	247	4.12
X3.4					4	6.7	39	65.0	17	28.3	253	4.22
X3.5			5	8.3	14	23.3	26	43.3	15	25.0	231	3.85
X3.6			1	0.7	6	10.0	41	68.3	12	20.0	244	4.07

Sumber data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas jawaban responden dalam penelitian ini dengan indeks tertinggi terdapat pada item pernyataan X3.2 skor 279 dengan rata-rata 4.65. Sedangkan indeks dengan nilai terendah terdapat pada pernyataan X3.5 skor 231 dengan rata-rata 3.85.

#### d. Diskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4 7 Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Kepatuhan wajib pajak**

Item	STS		TS		N		S		SS		Total	Mean
	F	%	F	&	F	%	F	%	F	%		
Y.1					5	8.3	43	71.7	12	20.2	247	4.12
Y.2					2	5.0	46	76.7	11	18.3	248	4.13
Y.3					3	5.0	42	70.0	15	25.0	252	4.20
Y.4					2	3.3	42	70.0	16	26.7	254	4.23
Y.5					3	5.0	46	76.7	11	18.3	248	4.13
Y.6					1	1.7	47	78.3	12	20.0	251	4.18
Y.7					6	10	46	76.7	8	13.3	242	4.03

Sumber Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas responden dalam penelitian ini dengan indeks tertinggi terdapat pada item pernyataan Y.4 yaitu 4.23. sedangkan dengan indeks terendah terdapat pada item pernyataan Y.7 yaitu 4.03.

### 3. Uji Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas

Berikut adalah hasil uji validitas yaitu variabel pengetahuan pajak, tarif pajak kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 4 8 Uji Validitas**

Variabel	Item	r- hitung	r-tabel	Keterangan
Pengetahuan pajak	X1.1	0,670	0,254	Valid
	X1.2	0,593	0,254	Valid
	X1.3	0,587	0,254	Valid
	X1.4	0,618	0,254	Valid
	X1.5	0,671	0,254	Valid
	X1.6	0,460	0,254	Valid
Tarif Pajak	X2.1	0,703	0,254	Valid
	X2.2	0,797	0,254	Valid
	X2.3	0,837	0,254	Valid
	X2.4	0,760	0,254	Valid

Variabel	Item	r- hitung	r-tabel	Keterangan
Kepercayaan pada pemerintah	X3.1	0,542	0,254	Valid
	X3.2	0,507	0,254	Valid
	X3.3	0,680	0,254	Valid
	X3.4	0,689	0,254	Valid
	X3.5	0,604	0,254	Valid
	X3.6	0,608	0,254	Valid
Kepatuhan wajib pajak	Y.1	0,759	0,254	Valid
	Y.2	0,675	0,254	Valid
	Y.3	0,742	0,254	Valid
	Y.4	0,659	0,254	Valid
	Y.5	0,612	0,254	Valid
	Y.6	0,679	0,254	Valid
	Y.7	0,592	0,254	Valid

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 variabel pengetahuan pajak, tarif pajak, kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak adalah valid. Dengan nilai r-tabel 0,254 lebih kecil dari nilai r-hitung pada semua variabel penelitian ini.

## 2. Uji Reabilitas

**Tabel 4 9 Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach alpha	Keteranga
Pengetahuan pajak	0,652	Reliabel
Tarif Pajak	0,764	Reliabel
Kepercayaan pada pemerintah	0,632	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,800	Reliabel

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini menghasilkan data yang reliabel dengan *Cronbach alpha* pengetahuan pajak X1 yaitu  $0.652 > 0.60$ . Tarif pajak X2  $0.764 > 0.60$ . Kepercayaan pada pemerintah  $0.632 > 0.60$  dan kepatuhan wajib pajak Y  $0.800 > 0.60$ .

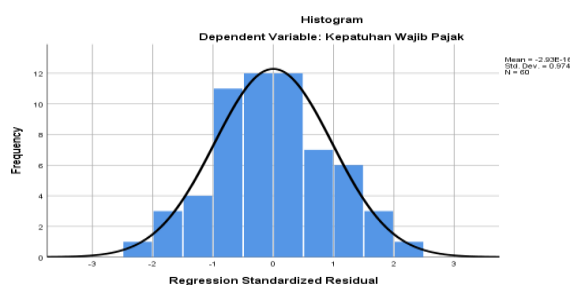


## 4. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan diagram histogram dengan ketentuan pola distribusi tidak serong ke kanan ataupun ke kiri dan apabila distribusi data berbentuk lonceng sehingga dapat dikatakan normal.

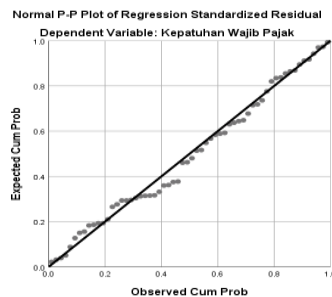
**Gambar 4. 1 Uji Normalitas Histogram**



Sumber Data disolah (2023)

Pada gambar uji normalitas grafik histogram, penelitian ini diketahui pola distribusi data tidak serong ke kanan ataupun ke kiri, tetapi ditengah dengan berbentuk lonceng sehingga hasil tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Selain itu uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik P-Plot. Grafik P-plot dapat dipahami dengan melihat penyebaran item pada garis diagonal grafik. Grafik diagonal dapat dikatakan tidak memenuhi syarat asumsi normalitas apabila item menyebar jauh di garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Dan apabila grafik P-Plot menyebar di sekitar garis P-plot serta mengikuti arah garis diagonal maka dapat memenuhi syarat asumsi normalitas.

**Gambar 4. 2 Grafik P-Plot**

Sumber Data diolah (2023)

Pada gambar uji normalitas grafik P=plot, pada penelitian ini menunjukkan bahwa grafik P-plot menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka data pada penelitian ini berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 10 Uji Multikolinearitas**

Coefficients		
Model	Colinarity statistic	
	Tolerans	Vif
Pengetahuan pajak	0.674	1.483
Tarif pajak	0.696	1.438
Kepercayaan pada pemerintah	0.846	1.182
a. Dependepn Variabel : Kepatuhan wajib pajak		

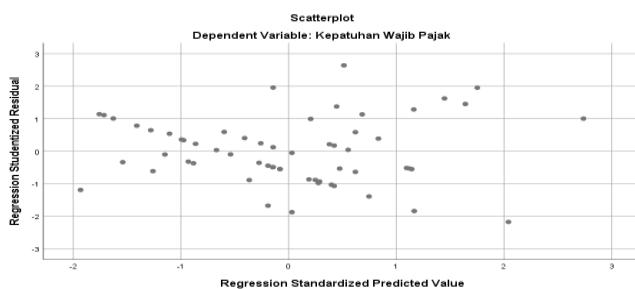
Sumber data diolah (2023)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerans untuk semua variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak dan kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai  $> 0,10$  dan nilai variance inflation factor (Vif)  $< 10,00$ , sehingga tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel bebas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut

**Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas**



Sumber Data diolah (2023)

Pada gambar uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta baik di atas maupun dibawah angka nol (0). Sehingga data penelitian ini tidak terdapat gejala heteriskedastistas.

## 5. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji regresi dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4 11 Uji Regresi lienar berganda**

Model		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	std. error	Beta		
1	(Constant)	1.383	.496		2.786	.007
	Pengetahuan pajak	.154	.131	.135	1.177	.244
	Tarif pajak	.283	.068	.470	4.163	.000
	Kepercayaan pada Pemerintah	.243	.087	.285	2.786	.007
a. Dependen Variabel kepatuhan wajib pajak						

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1.383 + 0.154 X1 + 0.283 X2 + 0.243 X3$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 1.383 hal ini berarti jika pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2) dan kepercayaan pada pemerintah (X3) tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0. Maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 1.383
2. Nilai koefisien regresi untuk pengetahuan pajak adalah sebesar 0.154 Artinya jika pengetahuan pajak meningkat satu satuan (1%), maka kepatuhan wajib pajak umkm akan cenderung meningkat sebesar 0.154.
3. Nilai koefisien regresi untuk tarif pajak adalah sebesar 0.283.. Artinya jika tarif pajak meningkat satu satuan (1%), maka kepatuhan wajib pajak umkm akan cenderung meningkat sebesar 0.283.
4. Nilai koefisien regresi untuk kepercayaan pada pemerintah adalah sebesar 0.243.. Artinya jika kepercayaan pada pemerintah meningkat satu satuan (1%), maka kepatuhan wajib pajak umkm akan cenderung meningkat sebesar 0.243.

## **6. Uji Hipotesis**

### **a. Uji Parsial**

Hasil analisis uji parsial untuk variabel pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2) dan kepercayaan pada pemerintah (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4 12 Uji t-hitung**

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	std. error	Beta		
1	(Constant)	1.383	.496		2.786	.007
	Pengetahuan pajak	.154	.131	.135	1.177	.244
	Tarif pajak	.283	.068	.470	4.163	.000
	Kepercayaan pada Pemerintah	.243	.087	.285	2.786	.007
a. Dependen Variabel kepatuhan wajib pajak						

Sumber Data diolah (2023)

### 1. Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji parsial variabel pengetahuan pajak (X1) diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1.177 dengan taraf signifikansi pengetahuan pajak (X1)  $0.244 > 0.05$ . Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

### 2. Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji parsial variabel tarif pajak (X2) diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4.163 dengan taraf signifikansi tarif pajak (X2)  $0.000 < 0.05$ . Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

### 3. Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji parsial variabel kepercayaan pada pemerintah (X3) diketahui bahwa nilai tt hitung sebesar 2.786 dengan taraf signifikansi kepercayaan pada pemerintah (X3)  $0.007 < 0.05$ . Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

## b. Uji Simultan

Hasil uji simultan pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.13 Uji simultan**

ANNOVA						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig	
1	Regression	3.181	3	1.060	18.883	0.000
	Residual	3.144	56	.056		
	Total	6.325	59			
a. Dependenden variable : Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors (constant, kepercayaan pada pemerintah, tarif pajak Pengetahuan pajak						

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil f (uji simultan) diketahui bahwa nilai f sebesar 18.883 dengan probabilitas sebesar 0.000 yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka.

### c. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat berikut:

**Tabel 4 14 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.709	.503	.476	.23696
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan pada pemerintah tarif pajak, pengetahuan pajak				
b. Dependent Variabel : Kepatuhan wajib pajak				

Sumber Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas diketahui nilai (R<sup>2</sup>) sebesar 0.503 atau 50.3%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel pengetahuan pajak (X<sub>1</sub>), tarif pajak (X<sub>2</sub>) dan kepercayaan pada

pemerintah (X3) memiliki kontribusi sebesar 50.3% dalam menerangkan kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memiliki kontribusi sebesar 49.7%.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengujian hipotesis pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Kolaka . Sehingga H0 diterima dan hiipotesis pertama H1 ditolak, artinya tinggi ataupun rendahnya suatu pengetahuan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Kolaka.

Pengetahuan pajak yang dimaksud adalah paham dan mengerti tentang ketentuan kewajiban perpajakan, mengetahui tata cara pembayaran pajak serta paham dengan fungsi dan tujuan pajak yang sebenarnya. Dari jawaban yang diberikan, mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju bahwa mereka telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan serta fungsi pajak. Namun mereka belum menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki serta mereka masih acuh terhadap pentingnya membayar pajak. Sehingga dengan pengetahuan pajak yang dimiliki belum dapat memastikan mereka menerapkan sesuai apa yang mereka pahami dari ilmu tersebut.

Oleh sebab itu tingkat pengetahuan wajib pajak belum dapat menjadi pendukung untuk wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan (Jaya Mertha, 2019) penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan membayar pajak masih belum bisa menjadi suatu budaya masyarakat Indonesia. Begitupun di kabupaten Kolaka yang belum menjadikan kepatuhan pajak sebagai budaya masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Larasati Lesmana & Setyadi, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta hasil penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Kolaka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil ini mendukung hipotesis kedua H2 yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif pajak merupakan suatu ketentuan jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak menjadi salah satu faktor penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tarif pajak yang ditetapkan pemerintah belum sesuai menurut pandangan wajib pajak dan wajib pajak merasa dibebankan dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.



Oleh karena itu semakin adil dan seimbang penetapan tarif pajak yang dikenakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Indikator dalam penelitian ini mencakup kesesuaian tarif, keseimbangan tarif serta kemampuan wajib pajak terhadap tarif yang telah ditetapkan. Wajib pajak umkm di kabupaten Kolaka memiliki pandangan bahwa tarif pajak umkm yang ditetapkan pemerintah telah sesuai dan seimbang dengan perekonomiannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju dengan bahwa mereka telah membayar tarif pajak sesuai dengan yang ditetapkan dan tidak keberatan dengan tarif pajak yang dibebankan serta tarif yang ditetapkan telah sesuai dengan perekonomiannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB)*, tarif pajak berkaitan dengan *normative beliefs* yang dimana dengan adanya acuan yang ditetapkan dapat menjadi motivasi yang mempengaruhi pandangan wajib pajak umkm dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan kesanggupan wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Mansur F, Maiyarni R, dan Prestyo E ., 2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Serta penelitian (Widodo Agus dan Muniroh Hetty, 2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

### **3. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten Kolaka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Kepercayaan pada pemerintah merupakan harapan masyarakat kepada pejabat pemerintah dalam menjalankan sistem hukum yang berlaku. Kepercayaan pada pemerintah menjadi salah satu penyebab kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak belum memiliki kepercayaan yang penuh terhadap kinerja otoritas pajak maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Namun apabila wajib pajak telah memiliki respek yang tinggi kepada otoritas pajak dan percaya bahwa pembayaran pajak yang dibayarkan dikelola untuk kesejahteraan rakyat maka tingkat kepatuhan yang ada pada diri wajib pajak akan meningkat.

Indikator pada penelitian ini mencakup kepercayaan pada sistem pemerintah, sistem hukum serta kepercayaan terhadap sistem pajak dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Wajib pajak umkm di kabupaten Kolaka memiliki pandangan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan sistem pajak telah dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar responden menjawab setuju dan sangat setuju

bahwa mereka memiliki respect yang tinggi terhadap otoritas pajak dan percaya bahwa pajak dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior (TPB)*. Kepercayaan pada pemerintah berkaitan dengan *control beliefs* yang dimana keyakinan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan seberapa kuat keberadaan atau lingkungan yang dapat mendukung ataupun menghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu dengan adanya kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja otoritas pajak dalam memenuhi harapan wajib pajak maka akan menjadi faktor pendukung wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian (Stevanny Fransisca & Prayudi Aristia, 2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Serta hasil penelitian (Qadariah & Diana, 2021) menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.